

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020*. September. Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2014). Salinan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta.
- Baso, Bintari, Selfiana & Sumarni. (2020). "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar.
- Hamzah, Andy P & Kustiani, Nur Aisyah. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. STAN PRESS.
- Humas PKN. (2019). Desiminasi Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara. <https://www.pknstan.ac.id/article/desiminasi-reformasi-pengelolaan-keuangan-negara>. diakses pada 30 November 2021.
- Izatunnisa, Heni. (2020). "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes. Tegal: Politeknik Harapan Bersama.
- Kementerian Keuangan. (2019). Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295/KM.6/2019 tentang *Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat*. Jakarta
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.05/2022 tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 *Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang *Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual*. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang *Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Noviyanti. (2021). "Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali".

Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.

Parwati, Nunung. (2016). “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng”. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali. Retrieved Maret 10, 2022, from <https://www.bpkp.go.id/bali.bpkp>

Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2003) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

Suryanovi, Sri (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Pusat*. Tangerang Selatan. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.